

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGEMBANGAN  
OBJEK WISATA DANAU RUSA TAHUN 2019-2021**

**Oleh : Alyf Valencia Erel**

Email. [alyfvalenciaerel6@gmail.com](mailto:alyfvalenciaerel6@gmail.com)

**Pembimbing : Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau.

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The local government of the Meranti Islands Regency is responsible for the development of sago plantations in the area, the problem of this research is the local government's commitment to the development of sago plantations in 2010-2020. The Meranti Archipelago Regency, which is one of the largest sago producers in Indonesia, still lacks plantation development.*

*This study aims to find out how the implementation of the Meranti Islands Regency government's commitment to the development of people's sago plantations in 2010-2020, and to find out what are the inhibiting factors of the government. The research approach used is an approach approach and this type of research is descriptive. The location of this research was conducted in Meranti Archipelago Regency, data collection was done by interview and documentation.*

*The results of this study are that first, the implementation of the commitment to developing sago plantations has not been maximized, it can be seen from the administrative coordination and policy coordination that has not been successful, so that there is still sago produced that has not been maximized. rejected due to lack of clarity and too large a budget. Environmental policies and external environmental policy programs for the development of smallholder sago plantations are legally weak, stemming from the bupati's regulations regarding the main duties and functions as well as a description of the duties of the forestry and plantation service of the Meranti Islands Regency. There are no local regulations on sago conservation and management.*

***Keywords: Initiative, Priority, Mobility, Law Enforcement and Constitution***

## PENDAHULUAN

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Merujuk pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, serta beberapa Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang kehutanan dan perkebunan, maka arah kebijakan pembangunan dan pengembangan sektor kehutanan dan sektor perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, secara garis besarnya akan dititik beratkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan ekonomi makro yang kondusif;
2. Pembangunan infrastruktur kehutanan dan perkebunan yang terpadu dengan wilayah pedesaan;
3. Melaksanakan reformasi keagrarian, revitalisasi dan restrukturisasi kehutanan dan perkebunan, baik dalam bidang teknis budidaya mampu industri;
4. Kebijakan pembiayaan dengan mengembangkan lembaga keuangan yang melayani kehutanan dan perkebunan, lembaga mikro pembiayaan pola syariah;
5. Penguatan dan pemantapan kelembagaan kehutanan dan perkebunan;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan hutan dan kebun melalui penerapan Hutan

Kemasyarakatan (*Social Forestry*) pembangunan kebun pola swadaya berbantuan;

7. Kebijakan pembangunan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran hasil produk kehutanan dan perkebunan;
8. Mengembangkan industri di pedesaan dengan berbahan baku hasil hutan dan kebun yang dikelola oleh masyarakat pedesaan;

## Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fenomena-fenomena di atas dan untuk tidak mengaburkan penelitian, maka penulis berusaha membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan perkebunan sagu tahun 2010-2020?

## Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian untuk mengetahui komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan sagu;

Manfaat Penelitian.

Adapun mafaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pemerintahan secara khusus mengenai pelaksanaan teori *Political Will* dalam pengembangan sagu di Kabupaten Meranti;
2. Manfaat praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi oleh lembaga terkait dalam pelaksanaan teori *Political Will* dalam pengembangan sagu di Kabupaten Meranti.

## Tinjauan Pustaka

### Studi Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mamun Murod, Cecep Kusmana, Mochamad Hasjim Bintoro, Widiatmaka dan Endang Hilmi, 2018. Analisis Struktur Kendala dalam Pengelolaan Sagu Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Roza Aprilianti. "Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis SumberDaya Lokal".

Nazrin. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Perkebunan Sagu Rakyat Tahun 2013".

Penelitian yang dilakukan oleh Amir Syamsuadi, Seri Hartati, Liza Trisnawati, Diki Arisandi, 2020. Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (Ikm)

Penelitian yang dilakukan oleh Septina Elida, 2017. Pemetaan Pertanian Potensial Dalam Pengembangan Agroindustri Unggulan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Sherlyia Paiti, 2016. Upaya indonesia mengeksport sagu ke Malaysia (studi kasus: Kabupaten Kepulauan Meranti).

Penelitian yang dilakukan Roza Aprilianti, 2017. Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

### Kerangka Teori

Teori yang digunakan yakni Political Will atau keinginan politik yang diartikan sebagai "niatan pimpinan" untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Keinginan

politik (Political will) juga diartikan apabila negara mempunyai kemauan, tetapi tentunya harus didukung oleh rakyat. Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian secara teoritis, political will adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan. Menurut Brinkerhoff (1999), ada beberapa indikator untuk mengukur political will pemerintah, yaitu:

1. Inisiatif pemerintah;
2. Prioritas dengan melakukan kajian-kajian terlebih dahulu;
3. Mobilisasi dukungan politik
4. Penegakan hukum wajib
5. Konsistensi dalam pelaksanaan

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita yang seharusnya terjadi di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.

#### Lokasi Penelitian

Penelitian tentang "Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Perkebunan Sagu Rakyat Di Kabupaten Kep. Meranti" dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan alasan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan dan perkebunan.

#### Sumber Data

- a. Informan Penelitian
  1. Bupati
  2. Anggota DPRD
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
  5. Kepala Bidang Perkebunan
  6. Tokoh Masyarakat dan Pekebun
  7. Ketua Kelompok Tani
- b. Dokumentasi  
Data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen resmi instansi pemerintah, media masa, internet, hasil studi terdahulu dan lain sebagainya.

#### Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian, antara lain mengenai tanggapan informan yang diperlukan. Sumber data primer ini dapat berupa hasil dari wawancara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada seluruh informan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat;
- b. Data Sekunder;
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti.

#### Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi  
Yaitu penelitian melakukan penelitian pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaah kepustakaan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung.
- b. Observasi  
Yaitu dimana peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

gejala-gejala mengenai upaya pemerintah dalam pengembangan perkebunan guna mendukung data-data yang penulis dapatkan dari data-data yang sebelumnya penulis dapatkan terlebih dahulu.

#### Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deksriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknis analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan lapangan (baik berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya).

### Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Inisiatif Pemerintah

Inisiatif berarti adanya suatu tindakan yang berasal dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Inisiatif dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kebaikan bersama. Inisiatif pada suatu pemerintahan dapat berupa program real atau kebijakan yang harus dijalankan demi tercapainya suatu tujuan. Inisiatif yang dilakukan tentunya berasal dari pemikiran yang matang dan tidak melanggar segala aturan yang berlaku, karena inisiatif ini jelas merupakan tindakan yang bertujuan baik, bukan suatu alat untuk

melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku.

Inisiatif juga haruslah bersifat fleksibel atau mampu menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada dan masih berlaku, agar tujuan yang tadinya baik tidak malah akan menimbulkan konflik baru dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai pengembangan perkebunan sagu rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk melaksanakan program pengembangan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti tentu menjadi komitmen pemerintah daerah yang diimplementasikannya dalam berbagai event, momen dan Program Kerja melalui SKPD terkait. Betapa tidak, mulai dari pelaksanaan Festival Sagu Nusantara di Jakarta yang diselenggarakan pertama kali dengan tujuan untuk memperkenalkan makanan sagu pada level nasional dan internasional, juga untuk mendukung program pemerintah dalam upaya ketahanan pangan di Indonesia. Upaya untuk terus mendorong perkebunan sagu juga dilakukan melalui kesepakatan Memorandum of Understanding (Mou) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam melakukan kajian meningkatkan hasil produksi tepung sagu dari setiap tual (batang) sagu untuk meningkatkan produksinya. Bahkan Pemerintah Kabupaten Meranti mampu melakukan kerjasama untuk menguntungkan daerah dengan pola sharing budget menyangkut pengembangan sagu.

Dalam suatu kebijakan berarti wujud suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum yakni bisa berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Eksekutif, serta program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan. Program-program inilah yang disusun struktur pengimplementasiannya agar selanjutnya menghasilkan perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mayoritas Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti masih tinggal di

perdesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kepulauan Meranti senantiasa mengalami peningkatan, dengan disertai penyerapan tenaga kerja masih cukup tinggi. Pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya yang dimiliki. Secara umum menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) persoalan pertanian atau perkebunan di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi berbagai hal berikut :

- 1) Sarana dan prasarana produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani
- 2) Serangan hama dan penyakit pertanian masih cukup tinggi
- 3) Harga hasil produksi pertanian tidak stabil
- 4) Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah
- 5) Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal
- 6) Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal
- 7) Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal
- 8) Akses permodalan bagi petani belum merata

Isu strategis pada urusan pertanian adalah masih cukup tingginya alih fungsi lahan, biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, belum optimalnya manajemen agribisnis, dan akses permodalan yang belum merata.

Dalam RPJMD terdapat misi “Menurunkan Tingkat Kemiskinan Melalui Swasembada Hasil-hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan”, maka indikasi rencana program yang akan dilakukan dan pendanaan untuk tahun 2010 – 2015.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Kepulauan Meranti, bidang perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan :

**a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Dengan kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan meliputi :

- 1) Melakukan pendataan pekebun/ masyarakat mengenai kondisi kepemilikan lahan.
- 2) Fasilitasi peningkatan status lahan masyarakat perkebunan (sertifikasi lahan pekebun)

**b. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Hutan dan Kebun**

Dengan kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan meliputi : Identifikasi wilayah kebun meliputi areal potensi penyebaran tanaman/ komoditi, kesesuaian lahan, kemungkinan pembangunan industri hulu dan hilir.

**c. Program Pembinaan Dan Penataan Hasil Hutan dan Kebun**

Dengan kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan meliputi :

- 1) Menyiapkan perangkat sumberdaya manusia bidang dan teknis perkebunan.
- 2) Pembinaan peningkatan sumberdaya manusia bidang perkebunan.
- 3) Melakukan pendataan klasifikasi kesesuaian lahan dan pemetaan sentra-sentra komoditi perkebunan unggulan.
- 4) Melakukan pendataan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, mengenai perijinan usaha, sumber bahan baku, kapasitas olah, produksi, luas lahan usaha dan lainnya.
- 5) Bimbingan teknis dan pelatihan petani tentang keterampilan okulasi bahan tanaman

**d. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan**

Dengan kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan meliputi :

- 1) Fasilitasi penyediaan sarana produksi berupa bahan tanaman/bibit unggul dan intensifikasi, melalui kegiatan :
- 2) Ekstensifikasi berupa kegiatan
- 3) Revitalisasi dengan melakukan kegiatan rehabilitasi dan peremajaan kebun rakyat

**e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan**

Dengan kegiatan yang akan diprogramkan meliputi : kegiatan “Pembinaan Mutu Hasil Produksi Perkebunan” Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan salah satu daerah yang memiliki areal perkebunan sagu terluas di Indonesia, setelah Irian Jaya, Maluku dan Kalimantan. Perkebunan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, awalnya merupakan perkebunan sagu rakyat, yang dikembangkan secara mandiri.

Pengembangan perkebunan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti diiringi dengan pengembangan industri pengolahan sagu yang meningkat pula. Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan jumlah pabrik sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yang diperoleh dari data saat ini berjumlah 63 pabrik, namun diperkirakan jumlah pabrik sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti melebihi 70 pabrik akan tetapi belum terdaftar semuanya.

**Tabel.III.2 Jumlah Pabrik Sagu perkecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013**

Kecamatan	Pabrik Sagu
TebingTinggi	3
T.Tinggi Barat	21
Rangsang	5
Rangsang Barat	1

Merbau	9
T.Tinggi Timur	22
Pulau Merbau	2
Jumlah	63

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2013

Izin usaha pabrik sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti diproses Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kepulauan Meranti. Izin usaha pabrik sagu masih dalam katagori usaha kecil menengah, karena untuk perusahaan besar yang mengelola industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti baru satu perusahaan yaitu PT. Nasional Sagu Prima yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

### 3.2 Prioritas dengan melakukan kajian-kajian terlebih dahulu;

Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh lahan gambut dan beberapa tempat terdapat lahan gambut tipis (<100 cm) dengan dasar tanah berupa liat (*clay*) dari bahan Aluvial yang sering disebut Tanah Redang/Tanah Kilang Manis. Pada Tanah Redang/Tanah Kilang Manis tanaman Sagu dapat tumbuh optimal. Tanah redang/tanah kilang manis mempunyai agak di pedalaman dengan kondisi air tawar. Pada dasarnya tanaman Sagu mampu tumbuh pada tanah mineral, gambut atau tanah bergambut, bahkan dalam kondisi lahan tergenang tanaman Sagu masih dapat tumbuh. Dengan demikian, keragaman jenis tanah dan lingkungan menyebabkan perbedaan pertumbuhan tanaman Sagu.

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka perlu dilakukan kajian potensi lahan melaluianalisis kesesuaian lahan Saguagar pengembangan Sagudi Kabupaten Kepulauan Merantidapat dilakukan secara optimal dan selanjutnya perencanaan pengembangan pembangunan Sagu lebih komprehensif, mencakup pembinaan teknis budidaya, pengembangan areal, penataan pengolahan produksi, dan lainnya.

Sebaran Luas Tanaman Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti

N o.	Nama Pulau/Kecamatan	Luas (Ha)
<b>I</b>	<b>PULAU MERBAU</b>	<b>1.260,00</b>
a.	Kec. Pulau Merbau	1.260,00
<b>II</b>	<b>PULAU TEBING TINGGI</b>	<b>25.986,00</b>
a.	Kec. Tebing Tinggi	381,00
b.	Kec. Tebing Tinggi Barat	9.021,00
c.	Kec. Tebing Tinggi Timur	16.584,00
<b>II I</b>	<b>PULAU RANGSANG</b>	<b>3.003,00</b>
a.	Kec. Rangsang Barat	255,00
b.	Kec. Rangsang Pesisir	2.225,00
c.	Kec. Rangsang	523,00
<b>IV</b>	<b>PULAU PADANG</b>	<b>8.365,00</b>
a.	Kec. Merbau	5.221,00
b.	Kec. Tasik Putri Punyu	3.144,00
	<b>TOTAL</b>	<b>38.614,00</b>

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2015.

Sagu juga ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah kelompok yang diperoleh.

Penarikan contoh tahap pertama dilakukan terhadap kelompok berupa kecamatan atau desa, sedangkan penarikan contoh tahap dua adalah terhadap petani atau masyarakat yang memiliki lahan tanaman Sagu. Pengambilan data dan pengukuran dilakukan terhadap petani/masyarakat tersebut.

Dalam penarikan contoh dua tahap (Two stage Cluster Sampling) dengan parameter yang diamati adalah karakteristik petani/masyarakat yang memiliki lahan tanaman Sagu dan karakteristik industri pengolahan Sagu. Adapun parameter yang diamati terdiri atas :

1. Luas kepemilikan tanaman Sagu rakyat,
2. Letak dan Sebaran tanaman Sagu rakyat,
3. Potensi Sagu (Jumlah pohon per ha atau

Jumlah rumpun per ha),

4. Pola pemanfaatan Sagu oleh masyarakat,
5. Kebutuhan bahan baku Sagu industri,
6. Kapasitas produksi tiap industri Sagu,
7. Produksi industri Sagu per hari atau per minggu,
8. Biaya produksi pengolahan Sagu ( biaya variabel dan biaya fixed industri),
9. Jalur pemasaran Sagu rakyat, dll.

Disamping itu, pengumpulan data karakteristik lahan tanaman Sagu, karakteristik petani/masyarakat dan karakteristik industri pengolah Sagu. Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada petani/masyarakat (daftar pertanyaan terlampir) dan para pemilik pabrik pengolahan Sagu. Wawancara dilakukan secara intensif dengan menggunakan questioner yang bersifat terbuka. Pengukuran dan pengamatan juga dilakukan terhadap lahan tanaman Sagu milik petani/masyarakat untuk mengetahui potensi tanaman Sagu. Pengukuran potensi tanaman Sagu dilakukan dengan menghitung seluruh jumlah pohon/rumpun yang dimiliki oleh petani/masyarakat. Adapun data sosial ekonomi yang diamati adalah menyangkut karakteristik petani/masyarakat, pemanfaatan Sagu dan pola pemasaran Sagu.

Persoalan tata batas kawasan hutan di Kepulauan Meranti senantiasa menjadi ancaman terhadap nasib lahan tanaman sagu rakyat. Pembukaan HTI baru-baru ini (April 2008) menyisakan konflik antara masyarakat desa (Desa Nipah Sendadu, Sungai Tohor, Tanjung Sari, Lukun dan Desa Kepau Baru) dengan pihak perusahaan. Kemungkinan pihak-pihak yang berkepentingan masih menganggap perkebunan sagu rakyat adalah "hutan sagu" yang mana tanaman sagu menjadi tanaman yang dominan pada kawasan hutan tersebut. Ini diperkuat dengan enggannya pihak Departemen Kehutanan melepaskan kawasan "hutan sagu" tersebut. Alih fungsi lahan sagu menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) mengakibatkan berkurangnya lahan garapan bagi masyarakat yang ingin membangun

perkebunan.

Metro TV dalam program acara 360 yang tayang tanggal 30 Januari 2014 dengan tema "*Kisah Pemasok Sagu Dunia*" menceritakan bahwa alih fungsi lahan hutan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur menjadi ancaman nyata bagi masyarakat pekebun sagu kedepannya, dimana pembukaan lahan hutan menyebabkan perkebunan sagu kurang mendapatkan pasokan air sehingga perkebunan sagu yang dominan tumbuh di area hutan tidak dapat tumbuh dengan baik karena tanah menjadi gersang kekurangan air. Tayangan program acara 360 dengan tema "*Kisah Pemasok Sagu Dunia*" dapat disaksikan kembali di situs Youtube.com dengan alamat <https://www.youtube.com/watch?v=Pd4jJmUYW18>.

Hasil produksi sagu yang ada didesa pincara yang dikelola oleh pak sadar berkualitas sangat baik karena air yang digunakan dari sumber mata air langsung yang menghasilkan sagu yang bersih dan memiliki warna yang sangat putih dibandingkan dengan air dari kolam yang memiliki kualitas sagu yang memiliki warna kecokelatan. Pohon sagu yang di kelola juga sudah memenuhi syarat untuk diteban sehingga memiliki kualitas sagu yang baik.

Manajemen usaha sagu

1)Manajemen bisnis merupakan proses perencanaan hingga pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dengan memaksimalkan hasil yang ada. Proses SDM merupakan keseluruhan proses yang berkaitan dengan usaha bisnis/perusahaan yang menyangkut segala sumber daya manusia dari perencanaan SDM, pengadaan SDM yang mencakup rekrutmen, seleksi dan pengenalan penetapan. Dilanjutkan dengan proses pengembangan yang mencakup pelatihan dan pengembangan karier. Dari hasil wawancara dengan masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan seorang petani yang, beliau mengatakan: "*Pekerja yang kami gunakan yaitu masyarakat satu kampung yang mau*

*ikut mengelola sagu basah'*

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja yang digunakan pak sadar tidak melalui sistem rekrutmen tetapi masyarakat yang mengelola sagu, tetapi pak sadar juga membatasi tenaga kerja yang digunakan guna meminimalisir anggaran, dan tenaga kerja yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak, untuk tipe usaha pak sadar yang masih skala kecil hanya menggunakan tenaga kerja maksimal 7 orang.

#### 2) Manajemen keuangan

Manajemen keuangan merupakan pengaturan keuangan yang dilakukan untuk menyeimbangkan arus masuk dan keluar, segala hal yang berkaitan dari hasil penjualan, pembelian, utang, harus dicatat sehingga mempermudah laporan keuangan. Atas dasar pemikiran di atas kebijakan program pembangunan perkebunan sagu rakyat bertujuan untuk memperhatikan nasib para perkebunan sagu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan seorang petani yang bernama pak Sadar, beliau mengatakan: *"Yang mengelola keuangan yaitu saya sendiri (pak sadar) dari modal awal yang digunakan sampai hasil penjualan. Hasil penjurana sagu kami di kurang modal awal, dan di bagi rata kepada setiap tenaga kerja"*

Dari hasil wawancara tersebut bahwa sistem pengelolaan keuangan di kelola oleh pak sadar, selaku orang yang dipercayakan tenaga kerja lain untuk kelola keuangan. Dari hasil penjualan yang sagu basah kemudian di bagi hasil kepada setiap tenaga kerja karena kesepakatan yang ditetapkan diawal sebelum melakukan usaha. Mengingat juga dalam produksi sagu setiap tenaga kerja sama-sama berperan aktif dalam produksi sagu basah.

#### 3) Manajemen pemasaran

Manajemen pemasaran sangat penting untuk menentukan aneka strategi penjualan produk diterima atau tidak oleh konsumen. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan seorang

petani yang bernama pak Sadar, beliau mengatakan:

*"Hail produksi sagu yang kami kelola kemudian kami menjual sagu dengan pengepul yang ada di lampuawa dan masyarakat yang ada di desa pincara dan desa tetangga lainnya dengan harga jual per karung 140 ribu"*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sagu pak sadar langsung di beli oleh pengepul tanpa harus memasarkan lagi ke pasar dan sebagian masyarakat desa pincara dan desa tetangga juga membeli sagu di pak sadar karena memudahkan masyarakat untuk membeli sagu tanpa harus ke pasar lagi apalagi pak sadar juga mengantar sagu yang di pesan ke ke rumah masyarakat. Hasil produksi sagu pak sadar di angkut menggunakan motor sampai ke lokasi yang diakses mobil. Biaya distribusi untuk mobil ditanggung oleh pengepul.

#### 4) Manajemen produksi

Manajemen produksi berkaitan kegiatan sehari-hari dan produksi. Seperti operasional untuk pembuatan barang dan lain sebagainya agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar

Dari hasil wawancara dengan pak sadar: *"Tenaga kerja yang kami gunakan sebanyak 5 orang, masing-masing tenaga kerja tersebut bekerja sama dalam, seperti dalam kegiatan pemerahan tenaga kerja secara bergantian sampai merasa capek"*

Dari hasil wawancara tersebut tenaga kerja tidak berfokus pada satu kegiatan produksi saja tetapi saling membantu dalam produksi guna untuk meminimalisir waktu, dari hasil observasi di pengelolaan sagu pak sadar bahwa proses produksi dilakukan mulai dari penebangan pohon, pemotongan batang sesuai ukuran, pengangkutan, pembelahan batang, pemerahan, pengangkutan hail parut, pemerahan, pengendapan, dan terakhir pengemasan sagu ke dalam karung. Dari kegiatan produksi yang dilakukan pak sadar

menghasilkan sagu

yang cukup banyak. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara, beliau mengatakan:

*"Sagu yang kami hasilkan dalam satu kali produksi sebanyak 150 karung dengan jangka produksi paling lama 20 hari"*

Dari hasil produksi sagu pak sadar menggunakan tenaga kerja sebanyak 5 orang dengan hasil produksi sebanyak 150 karung dengan waktu 20 hari menunjukkan bahwa kegiatan produksi sagu pak sadar memakan waktu yang cukup lama diakibatkan alat yang digunakan masih tradisional sehingga mengakibatkan terbatasnya proses produksi.

Hambatan pengembangan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti hal ini tercermin dari kegiatan pemerintah hanya berfokus padapembangunan daerah Pemerintah setempat masih belum memanfaatkan potensi desa secara baik, melihat potensi tanaman sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti cukup banyak tetapi dukungan dari pemerintah masih kurang.

Dari hasil wawancara dengan pak sadar mengenai bantuan pemerintah setempat dalam memanfaatkan tanaman sagu.

*"Selama kami mengelola sagu di sini belum ada semacam bantuan dari pemerintah, terutama akses jalan menuju ke lokasi yang memiliki tanaman sagu hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2"*

Dari hasil observasi peneliti, akses menuju ke lokasi pengolahan sagu pak sadar sangat sulit dijangkau diakibatkan kondisi jalan yang rusak diakibatkan terkikis hujan, kendaraan yang digunakan ke lokasi menggunakan motor yang sudah di modifikasi agar memudahkan melewati jalan yang rusak. Pak sadar juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya angkut hasil produksi sagu sampai ke lokasi yang dapat diakses mobil.

### **3.3 Mobilisasi dukungan politik yang berkaitan dengan dana yang diperlukan**

Pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah menyangkut berbagai aspek mengenai bagaimana tujuan suatu kebijakan dapat dicapai dengan mengikuti tahapan yang tertera, jadi implementor kebijakan sudah tinggal mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Di dalam pelaksanaan kebijakan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis ataupun Standar Operating Procedure (SOP) memuat prosedur kerja secara rinci dan sistematis mengenai serangkaian intruksi pekerjaan yang harus dilakukan, jadi nantinya akan mempermudah implementor kebijakan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam Melaksanakan Program Pengembangan Sagu tentu Sumber daya sangat penting dalam menjalankan suatu kegiatan baik itu sumber daya manusia, anggaran maupun sarana dan prasarana. Ini menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan serta sebagai penunjang sebuah kebijakan serta program ini bisa berjalan dengan baik dan efektif. Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya merupakan bagian yang penting yang dapat dijadikan sebagai penunjang keberhasilan suatu kebijakan, sebab, sumber daya merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan program.

Adapun salah satu sumber daya yang paling utama dalam hal ini yaitu sumber daya aktor. Karena sumber daya aktor merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi karena mampu menuangkan tenaga, pikiran serta waktu demi tercapainya program tertentu. Suatu kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan sumber daya aktor yang cukup berkualitas atau kompeten dibidangnya serta sumber daya aktor cukup kuantitas untuk melingkupi seluruh sasaran kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan serta penunjang sebuah kebijakan.

### 3.4 Penegakan hukum wajib diterapkan tanpa pandang bulu apabila ada penyimpangan

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepulauan Meranti, Ir Mamun Murod MM MH, menuturkan dalam kapurnews.com, selama ini banyak kepemilikan lahan perkebunan tidak sesuai aturan. Lebih lanjut, dia menuturkan selama ini pihaknya memang tidak bisa berbuat banyak, karena belum adanya tata ruang wilayah. Namun setelah penetapan terhadap kawasan hutan yang tertuang dalam tata ruang itu akan menjadi dasar yang kuat untuk dilakukan pembenahan tersebut.

*“Kalau dulu kita sulit. Sebab tidak ada aturan yang jelas atas penetapan kawasan hutan. Namun setelah Tata Ruang kita selesai nantinya dapat menjadi acuan yang sangat tegas untuk kita lakukan pembenahan, khususnya untuk kawasan perkebunan.”*

(<http://www.kapurnews.com/2014/08/29/dishutbun-meranti-akan-tata-kepemilikan-lahan-perkebunan-sagu>)

Jika penataan bisa dilakukan, maka akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah nantinya. Sebab, hingga kini belum ada masyarakat pemilik kebun yang membayarkan pajaknya kepada daerah.

Begitu juga dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Irwan Nasir menuturkan dalam haluanriaupress.com seluruh kebun sagu yang tersebar di Kepulauan Meranti agar dilakukan pendataan ulang.

*“Sebab, masyarakat tempatan hanya memiliki luasan kebun yang sangat sedikit. Yang memiliki lahan perkebunan sagu hingga ratusan bahkan ribuan hektare adalah para tauke suku Tionghoa. Sementara para tauke itu sangat minim yang patuh membayar pajak.”*

([http://www.haluanriaupress.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9646:bupati-minta-didata-ulang&catid=73:halaman-15&Itemid=83](http://www.haluanriaupress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9646:bupati-minta-didata-ulang&catid=73:halaman-15&Itemid=83))

Lanjut Bupati Irwan Nasir juga mengatakan, selama ini pihaknya telah berupaya mengajak para pengusaha tersebut agar dengan kesadarannya sendiri dapat membayar pajak sesuai dengan data di lapangan. Namun, realisasi pembayaran atau potensi hasil pajak dari perolehan PBB itu sejauh ini masih sangat mengecewakan. Untuk itu, kata Irwan, kepada seluruh camat dan kepala desa, mulai saat ini agar turun ke lapangan untuk mengetahui luas lahan termasuk untuk mengetahui siapa pemilik kebun.

*“Dari data itu juga nantinya petugas pajak bisa melakukan penghitungan dan sekaligus upaya penagihan. Ada kecenderungan perlakuan negatif di tengah masyarakat, terutama para pemilik kebun maupun para pemilik kilang sagu yang luas. Tampaknya para pengusaha ini harus diselidiki untuk mengetahui luasan lahan hingga ke besaran produksi yang sebenarnya..”*

([http://www.haluanriaupress.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9646:bupati-minta-didata-ulang&catid=73:halaman-15&Itemid=83](http://www.haluanriaupress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9646:bupati-minta-didata-ulang&catid=73:halaman-15&Itemid=83))

Adapun kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengendalian pencemaran air terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yaitu dalam melaksanakan pengendalian pencemaran, kepala satuan kerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup bertugas:

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi air dan sumber air serta sumber pencemar air dan sumber air;
- c. Menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran;
- d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. Memantau kualitas air pada air dan sumber air;
- f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Dari Pasal 27 ayat 3 diatas, bentuk kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dan

optimal. Ditandai dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik sagu yang sisa pengolahannya langsung dialirkan

kesungai, dari 50 (lima puluh) industri pengolahan sagu yang ada, limbah yang dihasilkan bisa mencapai puluhan ribu meter kubik per hari dan sebagian besar berasal dari industri menengah, bahkan sebagian industri kecil juga membuang limbah ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Adapun kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu: 12

Kewenangan sesuai dengan Peraturan Daerah dan kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan

No Kewenangan dalam peraturan daerah pasal 27 ayat 3 Kewenangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan

1. melakukan inventarisasi dan identifikasi air dan sumber air serta sumber pencemar air dan sumber air. Kewenangan dalam menerima laporan mengenai dugaan adanya pencemaran lingkungan;
2. Menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran. Kewenangan melakukan peninjauan ke lokasi mengenai dugaan pencemaran;
3. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
4. Memantau kualitas air pada air dan sumber air;
5. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air;

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang memahami dalam menerapkan peraturan daerah mengenai tugas dan kewenangannya dalam melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan. Tercemarnya sungai karena pembuangan limbah sagu ke sungai disebabkan karena kurangnya perhatian pelaku usaha dalam mengelola lingkungan. Sanksi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pasal (60) Pelanggaran

terhadap ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, Pasal 35 Ayat (1) dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **3.5. Konsistensi dalam pelaksanaan *political will***

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan tanaman perkebunan di Provinsi Riau adalah sumberdaya alam, sumber daya manusia dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Riau sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan tanaman Perkebunan.

Akan tetapi potensi tersebut akan memberikan dampak yang optimal apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik. Untuk itu sangat diperlukan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku pembangunan tanaman perkebunan.

Pendanaan untuk mencapai sasaran tersebut berasal dari APBD Provinsi Riau, dengan alokasi dana indikatif untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung selama periode 2019 - 2024 sebagai berikut salah satunya kebijakan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru (PIPIB) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. PIPIB ini sangat mempengaruhi area tanam sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Irwan menyebut aturan tersebut mempengaruhi hingga 96 persen dari total luasan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel dan profesional. Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan

pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang disesuaikan dengan potensi wilayah maka arahan pengembangan tanaman perkebunan untuk pembangunan tahun ke depan lebih difokuskan pada optimasi penggunaan lahan dan memanfaatkan inovasi teknologi.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan green economy yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA);
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan terkait dengan 6 aspek tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Karakteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor

yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan;

2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai kompetitif;
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam;
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA;
7. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat;
8. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mekanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
9. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim;
10. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

Untuk mengukur bagaimana efektivitas dari kebijakan program pembangunan perkebunan dan melihat faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan sagu rakyat ini, penulis melakukan penelitian berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Nugroho (2011).

Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang

sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Nugroho (2011) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dalam hal ini pengimplementasian kebijakan pengembangan perkebunan sagu dilakukan dalam bentuk program yaitu program pembangunan perkebunan sagu rakyat oleh sebab itu penulis melakukan penelitian yang berdasarkan kepada faktor keefektifan implementasi program menurut Nugroho (2011), yaitu:

### 1. Tepat Kebijakan

Untuk menilai sejauh mana ketepatan kebijakan program pengembangan perkebunan sagu rakyat dapat dilihat dari 3 hal, yaitu:

#### a. Kelengkapan Muatan Kebijakan Program Dalam Memecahkan Masalah Yang Hendak Dipecahkan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;

f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan

g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Perkebunan mempunyai fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, fungsi perkebunan sebagai berikut :

a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;

b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan

c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Sesuai dengan asas, tujuan dan fungsi perkebunan, program pembangunan perkebunan sagu rakyat diselenggarakan dengan tujuan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan ekonomi.

Seluruh pelaksanaan program pembangunan sagu rakyat diatur dalam alur permohonan bantuan masyarakat melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan perkebunan sagu rakyat tahun 2010-2020 melalui program pembangunan sagu rakyat dalam pelaksanaannya keselarasan dengan *political will*, ini dilihat dari:

- a. Ketidaksiapan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dilihat dari ketidaksiapan kelompok tani sagu sebagai sasaran kebijakan dimana banyak proposal yang ditolak karena ketidakjelasan dan anggaranyang terlalu besar.

- b. Lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan program pembangunan perkebunan sagu rakyat lemah secara hukum, hanya bersumber pada Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Tidak ada Peraturan Daerah Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Sagu.
2. Faktor pendukung efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan perkebunan sagu rakyat tahun 2013 adalah sebagai berikut :
  - a. Potensi perkebunan sagu sebagai penggerak ekonomi masyarakat;
  - b. Potensi sagu sebagai sumber daya pangan lokal pengganti beras;
  - c. Otoritas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dalam Mengembangkan Perkebunan.
3. Faktor Penghambat efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan perkebunan sagu rakyat tahun 2010-2022 adalah sebagai berikut :
  - a. Ancaman alih fungsi lahan sagu;
  - b. Kurangnya penataan kepemilikan lahan perkebunan sagu;
  - c. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pengusaha dalam pemasaran hasil produk perkebunan sagu; Kurangnya memadai sarana dan prasarana penunjang pengembangan perkebunan sagu..

#### Saran

1. Segera membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu seperti daerah penghasil sagu lainnya yakni Papua dan Maluku.
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai lembaga yang membantu Bupati dalam membuat dan melaksanakan kebijakan dalam pengembangan perkebunan sagu

lebih mensosialisasikan program pembangunan perkebunan sagu rakyat dan harus melakukan peninjauan terlebih dahulu seperti tinjau penataan alokasi lahan hutan dan perkebunan, tinjauan terhadap kesiapan masyarakat (kelompok tani sagu), dan letak geografis lahan perkebunan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Data kuantitatif lahan dan produksi sagu hendaknya diupdate 1 tahun sekali sebagai bahan perbandingan informasi terhadap ancaman alih fungsi lahan dan web yang ada di internet agar bisa orang orang lebih mudah memperoleh data.
4. Sagu sebagai sumber pangan lokal harus dikemas secara inovatif dan modern agar memiliki daya tarik sehingga masyarakat lebih tertarik mengkonsumsi pangan lokal

#### DAFTAR PUSTAKA

Ayu Oka Ariyani 2). Anton Happy Nugroho. "Peran Political Will Dan Organizational Culture Perusahaan Besi Dan Baja" ISSN : 2527-6840 (MediaOnline), Vol. 2 No. 01 2017.

Anonim "Model Pengembangan Pangan Lokal Sagu Provinsi Riau Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Peternakan".

Khairul Anwar., *Pola Perubahan Politik Lokal* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2012)., hal. 8

Mahda Reza Kurniawan, "Political Will di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" Vol. 2 No. 2 Tahun 2019

Nazrin. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengembangan Perkebunan Sagu Rakyat Tahun 2013".

Ripaldi "Potensi Usaha Sagu Dalam

*Mendukung Perekonomian Di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara*” 2017

pemerintah, Pemerintah an Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 dan 2.

Roza Aprilianti, *Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*. Universitas Riau Jom FISIP. Vol 4. No 2. (2017)

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm 273. 2010

Syamsuadi<sup>1</sup>, Seri Hartati<sup>2</sup>, Liza Trisnawati<sup>3</sup>, Diki Arisandi<sup>4</sup> <sup>1</sup> , "Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (Ikm). SSN 2656-8209 | pISSN 2656 -1565 No. 2 Tahun 2020 , Hal. 114 -128No. 2 Tahun 2020 , Hal. 114 -128

Septina Elida, Azharuddin M. Amin, Ekasari Alfiani, Dan Arif Komarudin, “Agroindustri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti Agroindustri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti” Jurnal Agribisnis Vol: 22 No: 1 Juni 2020 ISSN-P: 1412-4807 ISSN O: 2503-4375 70

Solahuddin Kusumanegara., *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gava Media, 2010)., hal. 53

## PERATURAN

PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembangian urusan pemerintahan antara